

## KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERUNGGASAN DI INDONESIA

SJAMSUL BAHRI

*Direktorat Perbibitan  
Direktorat Jenderal Peternakan – Departemen Pertanian  
Jl. Harsono RM No 3 Ragunan Jakarta Selatan*

### ABSTRAK

Perunggasan merupakan ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani, dan memberikan kontribusi sebesar 60,73%. Industri perbibitan ayam ras sudah sepenuhnya telah diusahakan oleh swasta, dimasa sumber genetik ayam ras masih tergantung pada impor *Grand Parent Stock* (GPS) dan sebagian *Parent Stock* (PS). Selain itu industri perunggasan ayam ras masih menghadapi kendala belum terkendalinya wabah flu burung, bahan baku pakan yang masih sangat tergantung dari impor, pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk peternakan serta ancaman masuknya *chicken leg quarter* (CLQ) dari luar negeri. Ternak local (ayam lokal dan itik) merupakan sumberdaya dalam negeri yang diusahakan oleh hampir setiap rumah tangga petani di pedesaan, sangat berperan dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat. Ternak lokal ini diharapkan mampu menjadi komplemen bagi usaha peternakan ayam ras. Kebijakan yang ditempuh adalah mendorong perbibitan ayam ras dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, biosekuriti, informasi yang transparan serta sistem pemasaran yang berkeadilan. Untuk unggas lokal kebijakan yang ditempuh adalah perbaikan bibit melalui BPTU, pemanfaatan potensi genetik plasma nutfah lokal, dan pembinaan yang teratur. Peran pemerintah dalam perbibitan ayam ras adalah sebagai regulator, motivator, dinamisator, dan fasilitator, sedangkan dalam perbibitan unggas lokal Pemerintah berperan dalam pelestarian plasma nutfah, penelitian dan permodalan.

**Kata kunci:** Kebijakan, perbibitan, perunggasan, ayam ras, unggas lokal

### PENDAHULUAN

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, pada tanggal 11 Juni 2005 di Jatiluhur, telah direspon Departemen Pertanian dengan menetapkan 17 komoditas sebagai unggulan, 3 diantaranya merupakan komoditas peternakan yaitu: sapi (sapi potong, sapi perah, dan kerbau); unggas (ayam ras, ayam kampung dan itik) serta kambing dan domba.

Dalam konteks RPPK, arti revitalisasi peternakan adalah kesadaran untuk menempatkan arti penting peternakan secara proporsional dan kontekstual. Revitalisasi peternakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, menyediakan pangan asal ternak yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dalam rangka mengurangi kemiskinan dan membangun SDM berkualitas. Produk peternakan ini merupakan komoditi pangan yang tidak bisa diganti oleh produk lain, sama strategisnya dengan beras, jagung dan produk pertanian lain.

Perunggasan di Indonesia merupakan ujung tombak dalam pemenuhan kebutuhan akan konsumsi hewani, saat ini ayam memberikan kontribusi terbesar yaitu 60,73% kemudian disusul daging sapi sebesar 23,39%.

Dalam usaha perbibitan unggas di Indonesia, industri perbibitan ayam ras sepenuhnya telah diusahakan oleh swasta, PMDN dan PMA, dimana sumber genetik ayam ras masih tergantung pada impor *Grand Parent Stock* (GPS) dan sebagian *Parent Stock* (PS). Kendala lain yang dihadapi adalah belum terkendalinya wabah flu burung, bahan baku pakan yang masih sangat tergantung dari impor, pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk peternakan serta ancaman masuknya *chicken leg quarter* (CLQ) dari luar negeri.

Disamping ayam ras, ternak lokal (ayam lokal dan itik) juga mempunyai potensi yang cukup menjanjikan dan diharapkan dapat menjadi komplemen bagi usaha peternakan ayam ras. Pada akhir-akhir ini pengembangan ayam lokal dan itik sebagai unggas pedaging maupun penghasil telur telah mulai bergeser

kepada cabang usaha atau usaha pokok dengan orientasi komersial. Di dalam pengembangannya usaha ini masih menghadapi kendala terutama ketersediaan bibit berkualitas dan dalam jumlah yang memadai serta masih sangat rentan terhadap wabah penyakit.

Untuk memacu industri perunggasan supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersaing di pasar global, maka perbibitan perunggasan diarahkan untuk menyediakan pangan hewani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian usaha, melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman sumberdaya lokal serta mendorong dan menciptakan produk yang berdayasaing ekspor.

### PERBIBITAN AYAM RAS

Tak bisa dipungkiri, peran industri perunggasan dalam pembangunan nasional terbukti sangat penting dan posisinya sangat strategis. Hal ini terlihat dalam peningkatan pendapatan peternak dan pelaku usaha terkait, penyerapan tenaga kerja dan penggerak kegiatan sektor ekonomi lainnya. Salah satu hal yang amat penting adalah perannya yang tidak bisa tergantikan dalam membangun kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Hasil unggas, baik telur maupun daging merupakan protein hewani yang harganya mudah terjangkau oleh masyarakat luas dan mudah diperoleh.

Peternakan ayam ras telah berkembang menjadi suatu industri yang terintegrasi secara vertikal dan sangat dinamis karena didukung oleh perusahaan yang padat modal dengan sistem manajemen yang modern. Di Indonesia industri perunggasan menghasilkan *day old chick* (DOC), baik PS atau *final stock* (FS). Seluruh kebutuhan DOC FS dipenuhi dari dalam negeri. Untuk DOC PS sebagian kebutuhan dicukupi dari produksi dalam negeri, sebagian lagi dipenuhi dari impor, sedangkan untuk GPS masih sangat tergantung dari impor. Impor ini dilakukan atas pertimbangan bahwa usaha tersebut lebih efisien dibandingkan dengan membangun usaha pembibitan di dalam negeri yang membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Industri penetasan umumnya menyatu

dengan industri pembibitan yaitu menetas telur dari PS untuk menghasilkan DOC FS yang siap didistribusikan.

Perusahaan pembibitan ayam ras untuk GPS yang operasional berjumlah 16 perusahaan (*broiler* 12 dan 4 *layer*) yang terpusat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Populasi GPS *broiler* dan *layer* (Juni 2006) adalah sebagai berikut, *broiler* 134.031 ekor (belum produksi) dan 274.309 ekor (produksi) dengan daerah penyebaran DOC PS ke 15 Provinsi (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi). *Layer*, populasi: 2.996 ekor (belum produksi dan 26.256 ekor (produksi), dengan daerah penyebaran ke 6 Provinsi (Jawa dan Sumatera).

Pembibitan PS *broiler* berjumlah 82 perusahaan (lokasi pembibitan ada di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi) dan 22 perusahaan PS *layer* (lokasi pembibitan Jawa dan Sumatera).

Proyeksi produksi FS *broiler* 24-25 juta ekor per minggu dan produksi *layer* 0,88 juta ekor per minggu. Untuk produksi riilnya sekitar 16-18 juta ekor per minggu dengan wilayah penyebaran DOC FS ke seluruh Indonesia.

Pembangunan industri perunggasan menghadapi tantangan yang cukup berat baik secara global maupun lokal karena dinamika lingkungan strategis di dalam negeri. Tantangan global ini mencakup kesiapan daya saing produk perunggasan, utamanya bila dikaitkan dengan lemahnya kinerja penyediaan bahan baku pakan, yang merupakan 60-70 persen dan biaya produksi karena sebagian besar masih sangat tergantung dari impor. Kendala yang menyebabkan pembangunan perunggasan tidak berjalan optimal diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adanya ancaman pasar global dan wabah *influenza* yang belum dapat diatasi secara tuntas.

Upaya meningkatkan daya saing produk perunggasan harus dilakukan secara simultan dengan mewujudkan harmonisasi kebijakan yang bersifat lintas Departemen. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor internal seperti menerapkan efisiensi usaha, meningkatkan kualitas produk, menjamin kontinuitas suplai dan sesuai dengan permintaan pasar. Terwujudnya industri perunggasan yang berdayasaing dicirikan oleh ketidaktergantungan terhadap komponen bahan

baku impor dan terjadinya transformasi dari skala usaha yang subsisten ke skala menengah maupun skala besar.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong perbibitan ayam ras dalam menghadapi tantangan yang ada adalah memperkuat industri perbibitan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, penanganan biosekuriti yang lebih baik, menyediakan informasi yang lebih transparan, serta dengan menciptakan sistem pemasaran yang lebih berkeadilan. Selain itu yang tidak kalah penting adalah mendorong impor GGPS atau *pure-line* untuk mengurangi ketergantungan impor GPS sehingga komponen impor bibit akan lebih kecil dan lebih menjamin ketersediaan DOC FS. Hal lain yang juga harus dilakukan adalah pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat peternak.

#### **PERBIBITAN UNGGAS LOKAL (AYAM DAN ITIK)**

Ayam lokal merupakan sumberdaya dalam negeri yang sudah beradaptasi dengan lingkungan di perdesaan dan sangat berperan dalam penyedia protein hewani bagi masyarakat, mengingat bahwa populasi ayam lokal di Indonesia yang cukup banyak (286.689.454 ekor, STATISTIK PETERNAKAN, 2005) dan diusahakan oleh hampir setiap rumah tangga petani di perdesaan. Umumnya pemeliharaan ayam ini masih bersifat tradisional, sehingga sangat rentan terhadap serangan penyakit. Potensi dan arah pengembangan ayam lokal ditujukan untuk: penyediaan daging dan telur dan resistensi terhadap pengendalian dan pencegahan penyakit.

Selain ayam, itik juga merupakan unggas lokal yang umumnya diusahakan sebagai penghasil telur, meskipun itik pedaging juga mulai mendapat tempat tersendiri pada sebagian konsumen. Peternakan itik di dominasi oleh peternakan rakyat dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional. Populasi itik di Indonesia saat ini sebanyak 34.275.340 ekor (STATISTIK PETERNAKAN, 2005) yang terdiri dari bermacam-macam jenis, diantaranya Alabio, Mojosari, Tegal, Turi, dan lain-lain.

Pembibit umumnya menetas telur dari induk yang biasanya digunakan produksi dan seleksi hanya terbatas pada penampilan telur, seperti bobot, ketebalan kerabang, bentuk dan warna. Industri pembibitan itik merupakan salah satu yang memiliki prospek pasar yang baik, mengingat permintaan itik petelur di Indonesia cukup tinggi.

Potensi dan arah pengembangan itik dititik beratkan pada perbaikan bibit, sehingga terjadi perbedaan antara itik untuk bibit dan itik untuk produksi. Program intensifikasi itik, dengan merubah pola pemeliharaan tradisional menjadi pemeliharaan terkurung atau intensif perlu dipertimbangkan dalam arah pengembangan peternakan unggas ke depan.

Ayam lokal dan itik mempunyai pangsa pasar tersendiri, sehingga bukan merupakan saingan bagi produk ayam ras, tetapi masih menghadapi kendala dalam produktivitasnya. Untuk itu strategi pengembangan usaha peternakan ayam lokal dan itik diarahkan pada usaha perbaikan bibit dalam upaya meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan potensi genetik plasma nutfah lokal. Pola pembinaan peternak baik secara langsung maupun tidak langsung perlu dilakukan dengan teratur. Hal ini harus diarahkan pada aspek produksi, manajemen dan pemasaran agar peternak menjadi tangguh, efisien, kompetitif, tidak marjinal dan tidak konsumtif. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah operasional dibedakan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dimana sudah disusun dan dibakukannya standar bibit unggas lokal.

#### **PERAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL (BPTU)**

BPTU merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan yang mempunyai tugas pokok melakukan pemuliaan, produksi dan pemasaran bibit unggul.

Dalam mendukung ketersediaan bibit unggas lokal, dibentuk 2 BPTU yaitu BPTU Sapi Dwiguna dan Ayam di Sembawa dan BPTU Kambing, Domba dan Itik di Pelaihari. BPTU ini telah melaksanakan program *breeding* diantaranya adalah pemurnian ayam

Arab dan ayam Merawang serta itik Mojosari dan itik Alabio.

### **KESIMPULAN**

Unggas sangat berperan penting dalam penyediaan protein hewani dan masih mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan potensinya. Untuk itu perlu adanya harmonisasi kebijakan antar kelembagaan (instansi) terkait dalam pengembangan perunggasan seperti pada kebijakan perpajakan, investasi, kemudahan ekspor, tata ruang dan perijinan. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan agar struktur produksi dapat berjalan dengan lebih baik pada implementasinya. Pemerintah berperan sebagai regulator yang bijaksana (adil, arif dan transparan), disamping berperan sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator.

Guna menjamin penyediaan pasokan DOC ayam ras yang akan merefleksi kebutuhan pakan, maka transparansi dalam informasi produksi di sektor hulu sangat membantu peternak maupun pemerintah untuk menen-

tukan langkah dan sikap bila terjadi kelangkaan atau kelebihan produk.

Peranan pemerintah, utamanya untuk melindungi industri ayam dalam negeri dari tekanan persaingan pasar global, mencegah persaingan tidak sehat antar perusahaan di pasar dalam negeri, pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular serta dukungan pembangunan infra struktur penunjang lainnya.

Untuk pembibitan unggas lokal, Pemerintah masih perlu untuk terlibat secara intensif terutama dalam pelestarian plasma nutfah, penelitian dan permodalan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- ANONIMUS, 2005. Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- BADAN LITBANG PERTANIAN, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Unggas. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.